

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Keuangan BPMD Kabupaten Rote Ndao disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh BPMD Kabupaten Rote Ndao selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan BPMD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan syarat penyusunan laporan keuangan yang baik dan mematuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah melakukan berbagai pembaharuan dan memiliki regulasi dibidang keuangan yaitu Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2011 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao dan Peraturan Bupati nomor 36 tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah kabupaten Rote Ndao serta Peraturan Bupati nomor 37 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao dengan tetap berlandaskan pada Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Keuangan ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah BPMD Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2018, selain itu Laporan Keuangan ini dimaksudkan untuk membandingkan Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Perbandingan dengan Anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pelaporan upaya-

upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

Dengan mengacu pada uraian latar belakang diatas dan penelitian sebelumnya, penulis ingin mengembangkan penelitian-penelitian tersebut. Berdasarkan uraian sebelumnya dan penelitian-penelitian sebelumnya maka penulis ingin mengajukan sebuah penelitian dengan judul "**Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Rote Ndao.**"

1.2 Perumusan Masalah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis membuat perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

Untuk mewujudkan syarat penyusunan laporan keuangan yang baik dan mematuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah melakukan berbagai pembaharuan dan memiliki regulasi dibidang keuangan yaitu Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2011 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao dan Peraturan Bupati nomor 36 tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah kabupaten Rote Ndao serta Peraturan Bupati nomor 37 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao dengan tetap berlandaskan pada Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi Pemerintah.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian diatas maka rumusan persoalan penelitian adalah;

1. Bagaimana akuntansi keuangan daerah pada pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja BPMPD kabupaten rote ndao

2. Bagaimana pelaporan akhir tahun anggaran pendapatan dan belanja BPMPD kabupaten rote ndao

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem Penerimaan kas dan Pengeluaran kas di BPMPD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Untuk mengetahui sistem akuntansi pengakuan, pengukuran, dan pencatatan belanja dan beban di BPMPD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagi Peneliti
yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan Ilmu dan menambah bahan bacaan bagi peneliti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
2. Bagi Pemerintah BPMPD
Bagi pemerintah, sebagai masukan yang dapat digunakan untuk perbaikan-perbaikan dalam penyempurnaan Sistem Akuntansi.